

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun untuk menjalankan pembangunan nasional diperlukan pembiayaan yang besar dan dalam pelaksanaan pembangunan harus adil serta merata di seluruh tanah air. Pembangunan nasional berkaitan erat dengan pembangunan daerah, ketika pembangunan di setiap daerah berhasil maka pembangunan nasional yang diharapkan akan tercapai. Perlu adanya keselarasan dalam perencanaan antara pembangunan daerah dengan pembangunan nasional sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai, dan harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Dilaksanakan melalui prinsip otonomi daerah. Menurut pasal undang undang tersebut, otonomi daerah merupakan serta mengurus untuk dapat melaksanakan dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerahnya, setiap daerah memberikan sumber-sumber keuangan sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah antara lain oleh kemampuan keuangan daerahnya yang salah satunya ditunjukkan oleh jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh.

Tentang pemerintahan daerah sebagaimana oleh beberapa perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah (y) diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Deny Juanda Puradimaja (2015) mengatakan pendapatan daerah di Jawa Barat setahun ini diturunkan Rp 436 miliar. “Ada revisi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari total Rp 15,851 triliun jadi Rp 15,415 triliun, turun RP 436 miliar. Puradimaja (2015)

mengatakan, kendati pendapatan turun, volume proyeksi APBD setahun digabungkan dengan Anggaran Perubahan yang akan masuk tahap pembahasan, diproyeksikan tetap naik. “Volume keseluruhan Rp 28,5 triliun,”

Pada APBD 2015 murni, volumenya tercatat Rp 25,3 triliun. Kenaikan volume anggaran setahun ini akibat penambahan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dari anggaran tahun lalu hasil audit BPK Rp 4,5 triliun. “Dari Rp 4,5 triliun Silpa, Rp 1,4 triliun sudah digunakan dalam APBD murni,”

Menurut Deny, ada sejumlah anggaran yang akan digeser karena tidak bisa digunakan. Diantaranya, dana hibah yang tidak bisa disalurkan akibat berlakunya Undang-Undang 23/2014 yang melarang hibah ditujukan pada kelompok masyarakat yang tidak berbadan hukum. “Nilainya Rp 264 miliar,” Deny mengatakan, sepekan ini sejumlah pergeseran anggaran akan dibahas untuk menyusun rancangan APBD Perubahan 2015. “Nanti kami akan dapat hitungan nett-nya di penetapan APBD (Perubahan),”

Menurut PT Gaikindo misalnya memangkas kuota penjualan mobil baru tahun ini dari 1,2 juta kendaraan menjadi 950 ribu hingga 1 juta kendaraan. Realisasi pendapatan pajak BBN kendaraan baru di Jawa Barat pada Semester I hanya tercapai 45,13 persen. “Mestinya pada semester pertama minimal sudah 50 persen. Tapi ini masih cukup baik, walaupun ada penurunan,”

Pos pendapatan lainnya mayoritas naik kecuali Pajak BBM karena turunnya harga bahan bakar bersubsidi. “Harga solar dan premium bersubsidi waktu penetapan APBD pada November 2014 premium misalnya masih Rp 8.500 per liter, di perjalanan harganya turun,” kata Dadang.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, dokumen KUPPAS ini akan menjadi bahan rujukan pembahasan Rancangan APBD 2015 bersama anggota Dewan. Dia mengakui, jadwal penyerahan dokumen itu terlambat. tapi yang penting Anggaran Perubahan tidak terlambat. Targetnya 15 September ini. Dari KUPPAS ini tinggal dipindahkan lebih rinci pada RAPBD Perubahan, pembahasannya lebih ringan,”

Jumat, 4 September 2015. Aher, sapaan Ahmad Heryawan mengatakan, penetapan APBD Perubahan tahun ini maju sebulan dibandingkan tahun lalu pada

bulan Oktober 2014. Dia optimis, serapan anggaran bisa lebih baik. “Serapan bisa lebih besar, dan capaiannya lebih teliti dan tepat sasaran,”

(Sumber:<https://bisnis.tempo.co/read/newsjawabarat/2015/09/07/08780233//deefisiensi-anggaran-dan-genjot-pad> ).

Jumlah penduduk (X1) dapat mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah. ketika jumlah penduduk meningkat maka semakin banyak pula masyarakat yang berbelanja, dengan banyaknya barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat akan menyebabkan perkembangan usaha-usaha di daerah tersebut semakin baik, dimana ketika usaha semakin besar maka jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah semakin tinggi. Selain itu penduduk sebagai input yang potensial, yang digunakan dalam proses produksi untuk meningkatkan hasil produksi perusahaan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi (X2) Dengan dijalankannya otonomi daerah , pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah mengambil kebijakan inisiatif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan untuk menaikkan pendapatan asli daerah (Desmawanti dkk, 2015). Oleh karena itu prioritas pembangunan daerah harus sesuai dengan potensi yang dimilikinya sehingga akan terlihat peran dari sektor-sektor potensial terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Upaya-upaya konkrit perlu dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut melalui peningkatan sumber penerima daerah, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Produk Domestik Regional Bruto (X3) yang dapat diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh unit kegiatan yang beroperasi pada wilayah atau daerah tertentu serta dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun. Peningkatan produksi barang dan jasa yang di ukur melalui PDRB suatu wilayah atau daerah dalam periode tertentu. Dengan menggunakan PDRB dapat dilihat bagaimana kemampuan daerah dalam mengelola sumberdaya pembangunan yang ada pada daerahnya, sehingga besarnya PDRB pada setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi dan faktor produksi yang dimiliki masing-masing daerah. Ketika PDRB mengalami peningkatan maka pendapatan asli daerah akan

meningkat karena menjadi tolok ukur pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah

Di dalam variabel jumlah penduduk diketahui Kota Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk sebesar 657.477 pada tahun 2015, jumlah ini lebih besar dibanding dengan tahun 2014 sebesar 654.794. Namun pendapatan asli daerah tahun 2015 lebih rendah dari tahun 2014, seharusnya ketika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan asli daerah juga mengalami peningkatan karena dengan banyaknya jumlah penduduk pendapatan yang ditarik akan meningkat dalam artian jumlah konsumsi meningkat sehingga usaha-usaha yang ada pada daerah sekitar akan semakin maju, ketika usaha semakin besar pajak yang ditarik akan semakin tinggi.

Di dalam variabel pertumbuhan ekonomi, di beberapa daerah pertumbuhan ekonomi yang positif belum tentu menghasilkan tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang positif. Hal ini terjadi hampir di semua kabupaten/kota seluruh Indonesia. Kabupaten Kerinci pada tahun 2012 tingkat pertumbuhannya 6,55% tetapi PAD-nya justru turun 8,36% ini terjadi juga di Kabupaten Merangin dimana pada tahun 2009 dan pada tahun 2012. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonominya 8,42% tetapi PAD-nya justru turun sebanyak 2,40%. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonominya 6,47% dan PAD mengalami penurunan sebanyak 24,05%. Tak terkecuali di Kabupaten Tebo pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo sebesar 5,96% tetapi PAD-nya malah mengalami penurunan sebesar 12,64% (Desmawanti dkk, 2015).

Di dalam variabel produk domestik regional bruto diketahui Kota Tasikmalaya memiliki PDRB sebesar Rp.15.234.112 pada tahun 2015 ini lebih besar dibanding dengan tahun 2014 sebesar Rp.13.623.772,9. Namun pendapatan asli daerah tahun 2015 lebih rendah dari tahun 2014 seharusnya ketika PDRB mengalami peningkatan pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan karena PDRB dapat digunakan sebagai tolok ukur pendapatan masyarakat dengan pendapatan asli daerah, ketika pendapatan seseorang semakin tinggi maka akan semakin tinggi juga seseorang akan membayar pajak yang ditetapkan pemerintah. Pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB

perkaptal riil suatu daerah maka semakin besar kemampuan masyarakat daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Penelitian ini selain berdasarkan fenomena yang terjadi, dilatarbelakangi oleh *gap research* yang dilakukan peneliti terdahulu yang masih ada perbedaan hasil penelitian seperti hasil Penelitian dari Batik, Karlina (2013) dan Mayza, dkk (2015) menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Liliana, *et al* (2011), Jaya & Widanta (2014), Asmuruf, dkk (2015), dan Murib, dkk (2016) menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian Adi (2006), Desmawanti dkk (2015), menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Naz`aina (2013) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

penelitian yang dilakukan oleh Muchtolifah (2010), Liliana, *et al* (2011), Batik, Karlina (2013), Jaya & Widanta (2014), Marliyani & Arka (2014), dan Mayza, dkk (2015) menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Asmuruf, dkk (2015) menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian diatas masih ada perbedaan hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel yang digunakan adalah Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruro serta menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan sampel yang digunakan adalah di provinsi Jawa barat tahun 2014-2016.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, sehingga judul yang diambil dalam penelitian ini Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Produk Domestik Regional Bruro Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **I.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
- b. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
- c. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diurutkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah?
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah?
- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah?

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan ini bahwa diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

- a. Manfaat Teoritis

Memberikan bukti untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan untuk dapat digunakan sebagai salah satu dasar kajian berikutnya serta menambah wawasan dan pengetahuan Membaca dikalangan akademis maupun non akademis mengenai faktor-faktor mempengaruhi pendapatan asli daerah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar penerimaan dimasa yang akan datang dapat di optimalkan.

2) Bagi Investor dan masyarakat

Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang mengenai gambaran keadaan keuangan pemerintah daerah.dan bagaimana pemerintah daerah mengelola dana untuk menjalankan pemerintahannya, serta memberikan pemahaman bagi masyarakat bagaimana peranan mereka melaksanakan adanya berperan aktif masyarakat di dalam mengawasi dan turut serta dalam mengawal penggunaan dana yang berasal dari masyarakat

